

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran anggaran dapat membantu merencanakan dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran perusahaan, baik itu sektor swasta maupun publik. Peran anggaran juga sebagai media koordinasi dalam sebuah manajemen guna membantu merealisasikan tujuan perusahaan (Sasongko dan Parulian, 2010). Di dalam sektor publik, anggaran lebih dikenal dengan APBN dan APBD. Anggaran pada sektor publik berisi tentang program kerja dan keperluan belanja pemerintah selama satu tahun. Saat ini, setiap daerah sudah mempunyai kewenangannya sendiri untuk membuat anggaran semenjak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah UU No. 22 Tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 32 Tahun 2004. Pembuatan APBD langsung dibuat oleh pemerintah daerah setempat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang beranggotakan dari manajer-manajer Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian APBD yang telah dibuat disahkan lewat DPRD wilayah tersebut (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014).

Dalam mengelola uang rakyat, pemerintah daerah dipercaya untuk melaksanakan serangkaian program untuk kepentingan khalayak, bukan hanya golongan tertentu. Saat ini, masyarakat sudah sangat cerdas dalam menganalisa kinerja pemerintah, disamping itu masih adanya oknum-oknum didalam internal pemerintah yang bisa merugikan daerah maupun negara.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk transparan dan bertanggungjawab dalam melakukan setiap kegiatan yang didanai oleh APBD, hal ini juga harus didukung oleh komitmen dari dalam internal pemerintah untuk selalu mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Pentingnya anggaran dalam sektor publik akan membantu meminimalkan pengeluaran pemerintah, anggaran dapat membantu pemerintah atau pemerintah daerah (Pemda) dengan menganggarkan program-program prioritas, serta dapat menekan biaya lainnya dengan memprioritaskan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kinerja pemerintah yang baik tidak lepas dari peran manajer selaku pimpinan manajemen. Manajer didalam sektor publik seperti kepala bagian juga perlu memahami prosedur anggaran, baik dalam penyusunan, pengawasan, maupun evaluasi. Saat ini belum ada tolok ukur yang pasti dalam mengukur tingkat keberhasilan pemerintah hal ini dikarenakan organisasi sektor publik tidak mempunyai pesaing seperti perusahaan swasta pada umumnya (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014). Maka dari itu APBD menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja dalam satu unit kerja pemerintah daerah dengan cara menilai pencapaian aktivitas-aktivitas yang tertuang di APBD (Mardiasmo, 2006 dalam Nugraha, 2015).

Pembuatan APBD tidak lepas dari peran manajer dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sendiri, manajer dalam SKPD terdiri dari kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala bidang, dan sekretaris. APBD disusun dan dirancang oleh SKPD sesuai bidangnya. Manajer yang berpartisipasi dalam menyusun APBD dituntut untuk lebih

mengetahui bidang yang diduduki, sehingga dalam pembuatan APBD manajer bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan ke dalam APBD. Dalam membuat APBD, setiap SKPD mempunyai program masing-masing untuk dijalankan demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Kepala bidang selaku manajer SKPD bertugas merancang APBD dibantu oleh karyawan, sehingga setiap lini mempunyai rasa tanggungjawab perancangan tersebut. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan APBD dapat memacu kinerja manajerial SKPD menjadi lebih efisien dan membuat mereka bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan.

Kinerja manajerial merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh satu kesatuan manajemen dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer dalam lembaga pemerintah daerah meliputi kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala bidang dan sekretaris yang bertugas sebagai pengawas terlaksananya anggaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manajer dituntut untuk memahami etika dan prosedur anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkannya independensi seorang manajer dalam melaksanakan wewenang dalam pembuatan anggaran, sehingga anggaran yang muncul adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak.

Didalam sektor publik selalu ada oknum-oknum yang mencari celah untuk mengambil keuntungan pribadi dari jabatan yang diduduki. UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa APBD harus disetujui oleh badan legislatif atau DPRD lewat sidang paripurna sebelum APBD tersebut dijalankan. APBD

DKI Jakarta sempat menjadi sorotan publik dengan adanya kasus di dalam APBD-P 2014. Kasus tersebut masuk ke dalam RAPBD 2015, dimana terdapat duplikasi anggaran APBD-P 2014 yang mencurigakan yaitu UPS (*Uninterruptible Power Supply*). Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama menyatakan proyek pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) tidak pernah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P DKI Jakarta 2014 (Suwiknyo, 2016 dalam www.solopos.com).

Kasus UPS sendiri menyeret nama Alex Usman, Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Zaenal Soleman serta anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah (www.detik.com). Alex Usman diduga melakukan korupsi terkait dana 25 UPS di 25 SMA/SMKN Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada APBD-P DKI Jakarta 2014 yang merugikan uang negara sebesar Rp. 81 Miliar. Alex Usman merupakan salah satu petinggi di dalam Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dinilai sebagai salah satu aktor yang memperlancar lolosnya pengadaan (UPS) untuk 25 SMA/SMKN Jakarta Barat serta memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dengan melakukan negosiasi dengan Firmansyah dan Fahmi Zulfikar selaku pihak DPRD untuk meloloskan UPS dalam APBD-P 2015.

Anggaran UPS baru disadari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama setelah adanya perdebatan dalam sidang paripurna APBD 2015 yang pada saat itu munculnya anggaran UPS, padahal Ahok tidak pernah mendapat laporan

terkait pengadaan UPS. Pengadaan UPS menggeser dana yang seharusnya ditujukan untuk membeli truk sampah pada waktu itu (ahok.org). Ini adalah salah satu bukti bahwa masih adanya intervensi dari lembaga lain dalam pembuatan APBD, terlebih lagi masih kurangnya peran petinggi dalam mengawasi jalannya APBD, seharusnya pihak eksekutif yaitu selaku pembuat APBD sudah mengetahui program-program apa saja yang akan didanai oleh APBD. Kasus ini menandakan masih belum optimalnya kinerja manajemen SKPD dan lembaga eksekutif lainnya dalam membuat APBD, serta kurangnya komunikasi antara lembaga eksekutif, legislatif dan petinggi daerah dalam pembuatan APBD. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan meloloskan anggaran 25 UPS kedalam APBD-P 2014.

Apabila kinerja internal pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan APBD masih belum optimal, maka sudah dipastikan terdapat lubang yang dapat menghambat jalannya program yang tertuang di APBD. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan minimnya daya serap SKPD DKI Jakarta, dengan kata lain program yang dijalankan SKPD Jakarta belum sepenuhnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada pertengahan Desember 2016 tercatat masih ada 7 SKPD DKI Jakarta yang daya serapnya masih dibawah 50%, dimana SKPD tersebut adalah dinas bina marga, dinas olahraga, dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dinas pendidikan, dinas perhubungan dan transportasi, dinas pertamanan dan pemakaman, dinas perumahan dan gedung pemda, serta dinas tata air

(www.harnas.com). Banyaknya anggaran yang tidak terserap karena adanya proyek yang dibatalkan, dan sengketa tanah di dinas pertamanan dan pemakaman. Adanya dana APBD yang tidak terserap akan menghambat pembangunan kota dengan banyaknya proyek yang tidak terlaksana.

Adanya oknum yang bermain didalam anggaran khususnya dalam kasus UPS di APBD-P 2014 karena belum transparannya sistem budgeting yang diterapkan pemerintah DKI Jakarta, sehingga banyak celah yang bisa diambil oleh oknum tersebut untuk bermain didalam anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah DKI Jakarta dibawah pimpinan Bapak Basuki Tjahaja Purnama saat itu membuat gebrakan dengan menerapkan sistem *e-budgeting* (merdeka.com). Adanya *e-budgeting* akan membuat anggaran DKI Jakarta akan lebih transparan, sehingga bisa diawasi oleh semua pihak, mengingat anggaran sangatlah rawan dan sering kali dimanipulasi di setiap tahapannya (merdeka.com).

Variabel independen penelitian ini adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Komitmen Organisasi. Variabel ini digunakan karena penelitian sebelumnya belum memberikan hasil yang konsisten dari masing-masing variabel terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sari, Sinarwati dan Sujana (2014) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Buleleng), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perluasan sampel penelitian dan

penambahan variabel. Pada penelitian ini, sampel dilakukan di SKPD DKI Jakarta Wilayah Jakarta Pusat, kemudian variabel Komitmen Organisasi ditambahkan dalam penelitian ini sesuai saran peneliti sebelumnya, alasan peneliti mengambil komitmen organisasi dibandingkan dengan variabel lain yang disarankan peneliti sebelumnya adalah peneliti ingin menguji variabel tersebut karena belum banyak yang meneliti komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan dan pengaruh individu yang diberi kesempatan dalam penyusunan anggaran oleh seorang yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi (manajer) (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014). Peran manajer untuk berpartisipasi dalam anggaran tidak hanya untuk mengawasi, terlebih manajer harus mampu membuat anggaran tersebut dan terlibat dari perencanaan anggaran sampai evaluasi, manajer yang mampu membuat anggaran akan memudahkan karyawan dalam berpartisipasi didalam pembuatan anggaran.

Penelitian yang mendukung variabel Partisipasi penyusunan anggaran adalah penelitian Apriansyah, Zirman dan Rusli (2014) menyatakan bahwa secara parsial Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Setyawan, Rohman dan Tarjono (2013) dan Nugraha (2015) bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian lain yang mendukung adalah Sukmantari, Wiraseda

(2015) yang menyatakan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial semakin baik apabila dalam satu kesatuan manajemen yaitu manajer dan bawahannya ikut andil dalam penyusunan anggaran, peran manajer serta bawahannya dalam penyusunan anggaran diyakini dapat mengefisiensikan anggaran dan membuat anggaran lebih berkualitas. Dengan adanya peran manajer seperti kepala badan, kepala bagian dan sub-bagian di SKPD beserta bawahannya dalam perencanaan APBD dinilai dapat meningkatkan kinerja dari manajemen itu sendiri.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh satuan kerja sebuah pemerintahan dapat membuat anggaran yang jelas dan spesifik sehingga dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas target pencapaian sasaran tersebut (Putra, 2013). Peran manajer untuk membimbing bawahannya sangat diperlukan untuk menjadi fasilitator apabila karyawan mengalami hambatan dalam pembuatan anggaran.

Manajer harus mampu membagi tugas yang jelas kepada bawahan supaya mereka tahu target yang akan dicapai, sehingga bawahan akan berkompetisi dalam membuat rancangan anggaran yang tepat. Rancangan anggaran tersebut akan dapat membantu mengefisiensikan keuangan pemerintah, sehingga dana tidak terbuang sia-sia. Selain itu, perlu adanya pengawasan

dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga terciptanya transparansi kepada pihak yang berkepentingan.

Penelitian yang mendukung kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial adalah Sari, Sinarwati dan Sujana (2014) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, kemudian pada penelitian Hidayat (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, pada penelitian ini disimpulkan bahwa apabila dalam pembuatan anggaran menghasilkan anggaran yang jelas maka akan membuat kinerja dari manajemen tersebut meningkat, hal ini karena struktur dan pembagian tugas yang diberikan manajer sudah jelas dan sesuai dengan bidang masing-masing, hal ini membuat manajer dan bawahannya tahu apa target yang akan dimuat, sehingga menghasilkan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Wahyuni, Rasuli, Diyanto (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuktikan kembali apakah kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Apabila internal SKPD sudah baik dan pembagian tugas sudah jelas, maka dalam pembuatan anggaran seharusnya menghasilkan APBD yang baik.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014).

Anggaran juga harus memuat program yang dibutuhkan masyarakat, apabila program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sudah seharusnya masyarakat merasakan dampak dari program tersebut sehingga masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap program yang telah dibuat pemerintah dan daya serap dari program tersebut tinggi. Dimana dengan adanya apresiasi dari masyarakat akan membuat kinerja pemerintah akan lebih baik lagi dikemudian hari. Lain halnya apabila internal SKPD memiliki struktur yang berantakan, maka dalam pembagian tugas pembuatan APBD akan tidak jelas dan menghasilkan anggaran yang tidak berguna, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak dari program tersebut.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, dalam hal ini proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dipentingkan seperti DPRD dan masyarakat (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014). Satuan Kerja yang merancang APBD mempunyai bidangnya masing-masing. Setiap APBD yang dirumuskan terdapat pertanggungjawaban atas perencanaan hingga evaluasi dari program kerja tersebut. APBD yang dirancang harus melalui DPRD untuk dikaji apakah dibutuhkan pada saat itu

atau sebaliknya. Kemudian APBD yang telah dijalankan harus dilaporkan secara transparan, sehingga terdapat penilaian atas program yang telah dijalankan.

Oleh karena itu, penilaian kinerja dari SKPD tidak dapat dirumuskan secara seragam melainkan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Penilaian dari kinerja dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan (Sari, Sinarwati dan Sujana, 2014).

Dalam organisasi publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi ini muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka DPRD itu sendiri merupakan agen dari publik/warga yang ada dalam daerah tersebut. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi yang logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal* (Wahyuni, 2015).

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial adalah Sari, Sinarwati dan Sujana (2014) menyatakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Kemudian pada penelitian Wahyuni, Rasuli dan Diyanto (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa masih adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga membuktikan bahwa Akuntabilitas publik belum bisa dikatakan dapat meningkatkan kinerja manajerial dikarenakan masih adanya kinerja SKPD yang belum memuaskan, meskipun prinsip akuntabilitas sudah diterapkan ke pihak internal maupun eksternal (Wahyuni, Rasuli, Diyanto, 2014).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah perilaku yang digunakan untuk mengukur/mengevaluasi kekuatan para pegawai untuk bertahan pada suatu perusahaan (Adamy, 2010). Adanya komitmen organisasi pada pemerintahan akan membuat para manajer dan karyawan lebih loyal dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Peran manajer sebagai kepala Satuan Kerja harus dapat menciptakan atmosfer yang baik, sehingga karyawan merasa nyaman saat berada ditempat kerja, serta adanya pekerjaan yang jelas sehingga akan membuat persaingan antar karyawan lebih kompetitif.

Komitmen organisasi yang kuat ditandai dengan kesesuaian tujuan organisasi dengan kemauan bekerja untuk kepentingan perusahaan (Angle dan Perry, Potter et al dalam Setyageng dalam Dewi, 2014). Dengan adanya komitmen organisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan, serta membuat karyawan bekerja sungguh-sungguh, dalam pemerintahan diharapkan karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya tentang komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial adalah Dewi (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hasil tersebut didukung oleh penelitian Apriansyah, Zirman dan Rusli (2014) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak hasil penelitian yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti empiris terbaru terkait dengan hasil penelitian yang beragam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) DKI Jakarta Wilayah Jakarta Pusat.

Berdasarkan *gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta Wilayah Jakarta Pusat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat** dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut ini akan diuraikan apa saja yang menjadi masalah dalam kinerja manajerial:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas manajer dalam lembaga pemerintahan.
2. Terdapat oknum-oknum yang mengambil keuntungan dalam APBD, sehingga mengindikasikan kurangka kinerja dan independensi dari Satuan Kerja dalam proses pembuatan APBD.

3. Minimnya daya serap SKPD DKI Jakarta pada pertengahan Desember 2016.
4. Terdapat anggaran yang tidak tepat dimasukkan didalam APBD-P DKI Jakarta 2015 yang menjelaskan bahwa masih belum optimalnya kinerja manajerial dalam membuat anggaran yang jelas.
5. Manajer dan bawahan yang berpartisipasi dalam proses anggaran akan membuat kinerja manajemen lebih produktif serta meningkatkan rasa kebersamaan antaranggota.
6. Anggaran yang memuat tujuan yang jelas akan menimbulkan reaksi positif terhadap kinerja manajemen berupa peningkatan kepuasan kerja, peningkatan sikap karyawan dan juga efisiensi biaya pelaksanaan anggaran.
7. Pemerintah yang transparan dan bertanggungjawab terhadap anggaran akan memunculkan banyak masukan untuk menjadi evaluasi bagi aparat SKPD, sehingga akan menciptakan kinerja manajemen yang semakin baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terdapat beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan penelitian Kinerja Manajerial. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh yang ditimbulkan dari Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Komitmen Organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta Wilayah Jakarta Pusat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat?
3. Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat?

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh faktor-faktor terhadap kinerja manajerial. Sehingga dapat memperkuat teori *agency* dalam memberikan penjelasan dan penguatan mengenai partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan komitmen organisasi yang membuat pemerintah (*agent*) dapat meningkatkan kinerjanya dengan optimal sesuai dengan amanah yang diberikan DPRD dan masyarakat (*principal*).

2. Kegunaan Praktis

2.1. Diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan untuk manajemen SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial.

2.2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga mengambil variabel yang sama.